



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi ekonomi sebagai makna pasal 33 UUD 1945 yang dituangkan dalam GBHN 1999 – 2004 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional ke dalam tiga hal pokok, yaitu membangun perekonomian yang berkeunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai negara agraris dan maritim, memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai aktor utama pembangunan ekonomi dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah dalam rangka mempercepat otonomi daerah. Makna dari demokrasi ekonomi tersebut adalah pembangunan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai rakyat banyak di setiap daerah adalah sumberdaya agribisnis. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumber daya alam (seperti lahan dan keragaman hayati), sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dibidang pertanian. Oleh karena itu strategi pembangunan ekonomi daerah yang memenuhi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah strategi pembangunan yang yang berbasis pada pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, pelaksanaan otonomi daerah serta sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk lebih menggalakkan pembangunan di kawasan timur Indonesia maka diperlukan adanya usaha-usaha pengembangan agribisnis secara





terpadu dengan mengikutsertakan berbagai potensi daerah. Tujuan dari pengembangan tersebut harus dapat meningkatkan pendapatan petani yang berpendapatan rendah, membangun agribisnis sebagai usaha terpadu, pemanfaatan sumberdaya lahan yang berdayaguna dan berhasil guna serta pemerataan pendapatan di pedesaan.

Pengembangan kawasan timur Indonesia (KTI) merupakan tuntutan obyektif, sekaligus politis, dari kegiatan pembangunan nasional yang telah dicapai selama ini. Pertimbangan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi merupakan dasar yang sangat kuat bagi pengembangan kawasan tersebut. Pengembangan KTI haruslah didasarkan pada keunggulan (komparatif dan kompetitif) yang dimiliki kawasan tersebut, yang dilihat dari pandangan kepentingan nasional, dari wawasan wilayah KTI sendiri, dari kepentingan kegiatan yang akan dikembangkan (sektoral atau komoditi) dan dari kepentingan daerah (propinsi atau kabupaten) di dalam KTI.

Kegiatan agribisnis merupakan kegiatan yang berbasiskan pada :  
(1) keunggulan sumberdaya alam (*on-farm agribusiness*) yang terkait erat dengan penerapan teknologi dan keunggulan sumberdaya manusia bagi perolehan nilai tambah yang lebih besar (*off-farm agribusiness*), (2) merupakan kegiatan yang memiliki ragam kegiatan dengan spektrum yang sangat luas baik dari skala usaha kecil dan rumah tangga hingga skala usaha raksasa, dari yang berteknologi sederhana hingga yang paling canggih yang kesemuanya itu saling terkait dan saling mempengaruhi.





Kawasan timur Indonesia merupakan wilayah ekonomi yang memiliki sumberdaya alam unggul, khususnya dalam bentuk sumberdaya kelautan, kehutanan, peternakan, perkebunan dan hortikultura. Kondisi ini menunjukkan keunggulan KTI bagi pengembangan *on-farm agribusiness*. Hal ini menjadi semakin penting mengingat keberadaan beberapa sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah KTI, misalnya untuk perikanan, peternakan, beberapa komoditas perkebunan seperti pala, lada atau kelapa.

Pengembangan kegiatan ekonomi KTI juga membutuhkan dorongan pertumbuhan yang cukup besar dengan perolehan nilai tambah yang cukup besar pula untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan daerah lain. Untuk itu pemanfaatan potensi sumberdaya alam harus dikaitkan dengan kegiatan yang memiliki kemampuan memberikan nilai tambah yang tinggi.

Pengembangan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya KTI juga perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak hanya dikuasai dan dirasakan manfaatnya oleh kelompok usaha tertentu, terutama kelompok usaha besar. Pengembangan KTI harus dapat diwujudkan sebagai suatu bentuk pengembangan kesempatan usaha baru bagi rakyat KTI sendiri baik skala kecil, menengah maupun besar. Walaupun pengembangan usaha (besar) dari luar tetap mendapat tempat sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan skala usaha yang efisien. Dalam hal ini pengembangan agribisnis sebagai subsektor yang memimpin,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB



memberikan kemungkinan tersebut mengingat kegiatan yang tercakup didalamnya melingkupi kegiatan berskala kecil hingga besar.

Dalam konteks pembangunan agribisnis, setiap daerah dalam KTI perlu mengembangkan kegiatan agribisnis secara spesifik berdasarkan keunggulan masing-masing daerah. Berdasarkan kondisi agro-ekologisnya, KTI dapat dikelompokan dalam (1) Nusa Tenggara (NTB dan NTT), (2) Sulawesi dan (3) Irian Jaya (Krisnamurthi, 1994). Untuk wilayah Sulawesi memiliki kekhususan dalam perkebunan, peternakan, pangan dan hortikultura.

Kawasan timur Indonesia yang relatif masih tertinggal dari kawasan Indonesia lainnya dalam menghadapi permasalahan pembangunan khususnya dibidang agribisnis berupaya untuk melakukan pengembangan agribisnis secara terpadu. Pengembangan agribisnis yang salah satunya adalah usaha ternak yang berkelanjutan, didalam pelaksanaannya sering terfokus hanya pada salah satu subsektor saja serta kurang mengoptimalkan peran atau partisipasi petani sebagai pelaku utama dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan. Hal ini dapat menjadi penghambat keberhasilan usaha peningkatan ekonomi petani di pedesaan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di kawasan timur Indonesia, pemerintah diantaranya telah melakukan pengembangan usaha ternak di kawasan timur Indonesia yang dikenal dengan nama PUTKATI (Proyek pengembangan usahatani dan ternak di kawasan timur Indonesia) yang dilakukan secara terpadu antara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB





subsektor peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan dengan lokasi kegiatan di sembilan kabupaten di tiga propinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Keberhasilan dari usaha pengembangan sektor agribisnis di kawasan timur Indonesia tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sumberdaya alam beserta daya dukung lingkungannya, kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku agribisnis yang relatif terbatas, pengetahuan tentang teknik budidaya pertanian dan peternakan, dukungan modal kerja yang terbatas serta kurangnya kerjasama kelembagaan yang terpadu antara berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha ternak. Selain itu, sejalan dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah semakin bertambah. Dalam rangka memanfaatkan otonomi yang luas tersebut, pengembangan usaha ternak sebagai bagian dari pengembangan agribisnis perlu didukung oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengembangkan usaha dibidang pertanian.

Maksud baik dari pengembangan usaha agribisnis seringkali tidak mencapai sasaran sehingga peternak tidak diberdayakan dalam arti pengembangan kemampuan usaha akan tapi hanya terbatas pada pemberian input untuk suatu kegiatan saja, serta masih banyaknya daerah miskin yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangan sumberdaya modal atau strategi pengembangan agribisnis yang tidak tepat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB



Sementara itu, suatu konsep pengembangan usaha ternak yang baik dalam pelaksanaannya dapat menemui hambatan dikarenakan kebijakan yang terus berubah dari para pengambil keputusan di daerah. Tidak tetapnya kebijakan pemerintah daerah seringkali diperburuk oleh rendahnya kemampuan manajemen sumberdaya manusianya.

Secara umum populasi ternak di Indonesia cenderung meningkat seperti ditunjukkan dalam Tabel 1. Sementara itu pengembangan usaha ternak dan ternak di KTI merupakan bagian dari pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dalam lima tahun mendatang (2000 - 2005), sehingga diharapkan pada tahun akhir tahun 2005 Indonesia telah mencapai swasembada daging (Sudardjat, 2000).

Tabel 1. Perkembangan Populasi Ternak Indonesia 1994 – 1998 (Dalam ribuan ekor)

JENIS TERNAK	1994	1995	1996	1997	1998
Sapi Potong	11.368	11.534	11.816	12.149	11.951
Sapi Perah	334	341	348	353	360
Kerbau	3.104	3.136	3.171	3.238	3.242
Kambing	12.770	13.167	13.840	14.540	14.555
Domba	6.741	7.168	7.725	7.963	8.012
Babi	8.858	7.720	7.597	8.638	8.532
Kuda	611	609	579	582	585
Ayam Buras	243.260	250.080	260.713	271.756	280.250
Ayam Petelur	63.335	68.897	78.707	78.707	35.420
Ayam Daging	622.965	689.467	755.596	756.784	264.874
Itik	27.536	29.616	29.959	31.177	32.350

Sumber : Capricorn Indonesia Consult Inc. 1998

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha ternak sebagai bagian dari sektor agribisnis menuntut dilakukannya perumusan strategi yang tepat. Strategi pengembangan usaha ternak dan ternak ini tidak hanya ditujukan untuk peningkatan produktivitas dan tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
 Institut Pertanian Bogor

MB-IPB



pembangunan yang sifatnya jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Usaha-usaha pengembangan usaha ternak sebagai bagian dari pengembangan agribisnis secara keseluruhan kurang dapat meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan peternak dalam bentuk peningkatan kemampuan berusaha dibidang tersebut.

Pengembangan usaha ternak didalam pelaksanaannya sering terfokus hanya pada salah satu subsektor saja serta kurang mengoptimalkan peran atau partisipasi peternak sebagai pelaku utama dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan.

Keberhasilan pengembangan usaha ternak di kawasan timur Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya alam, manusia dan teknologi. Selain itu, kebijakan yang berubah – ubah dari para pengambil keputusan di daerah dapat menjadi masalah dalam pengembangan usaha ternak..Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi upaya untuk memperbaiki kesejahteraan peternak di daerah miskin yang menjadi tujuan dari pengembangan agribisnis di Kawasan Timur Indonesia.

## 1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





1. Faktor - faktor apa yang menjadi hambatan dalam pengembangan potensi usaha ternak di Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan ?
2. Strategi apa yang tepat untuk pengembangan usaha ternak yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan ?

#### 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian tentang strategi pengembangan usaha ternak di Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha ternak di Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Memilih strategi yang tepat untuk pengembangan usaha ternak di Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan.

#### 1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari analisis permasalahan dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha ternak sebagai subsektor andalan pembangunan daerah sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat peternak di kawasan timur Indonesia.

Bagi penulis, penelitian ini merupakan kajian yang dapat memperluas dan memperdalam pemahaman dalam bidang manajemen strategik sesuai dengan pendalaman minat yang penulis pilih di Program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.







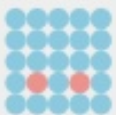
Studi Magister Manajemen Agribisnis, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

## 1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi pada aspek pengembangan usaha ternak besar, yakni sapi secara terpadu yang telah dilakukan melalui studi kasus terhadap proyek PUTKATI di wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk memilih strategi pengembangan dari beberapa alternatif pengembangan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bulukumba.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.